

**TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN
JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK NO. 11 TAHUN 2012**

(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017)

SKRIPSI

Oleh

Lutfia Izza Medina

NIM.C05215017



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfia Izza Medina

NIM : C05215017

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Jaksa
Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak Nomor. 11 Tahun 2012 (Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor.68/PUU-XV/2017)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2019



Saya yang menyatakan,

Lutfia Izza Medina

C05215017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lutfia Izza Medina NIM.C05205017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Mei 2019

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name.

Drs. Ach. Yasin, M. Ag

NIP . 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Lutfia Izza Medina NIM. C05215017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP.1967072719960310002

Penguji II



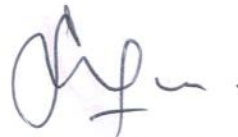
Drs. H. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP.197303132009011004

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 10 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lutfia Izza Medina
NIM : C05215017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : Izzamedina70@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* TERHADAP KEWENANGAN JAKSA DALAM
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK NO. 11 TAHUN 2012
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2019

Penulis

Lutfia Izza Medina

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Tinjauan Fikih *siyāsah* Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor.11 Tahun 2012 (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XV/2017)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017, serta bagaimana Tinjauan fikih *siyāsah* terhadap Kewenangan Jaksa dalam Mengadili perkara anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif. Selanjutnya akan disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu fikih *siyāṣah*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenang. Jaksa terhindar dari rasa takut dengan ancaman dijatuhi sanksi pidana atau kriminalisasi dalam menangani perkara anak. Selain itu jaksa dapat bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya dengan tidak mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ditinjau dalam konteks fikih *siyāsah* kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 kembali kepada Undang-Undang Kejaksaan. Kedudukan *wilāyah al-mazālim* dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi. *Wilāyah al-wazālim* adalah pengadilan yang berwenang memutus perkara yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Jaksa terikat sistem peradilan dalam Menangani perkara anak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka untuk mengoptimalkan kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 tidak melakukan penahanan untuk proses penuntutan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Apabila hal tersebut dilakukan maka termasuk merampas kemerdekaan seseorang, yang bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945¹. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidaklah cukup dengan dengan merumuskan ciri khas dari Negara hukum, menegakkan kekuasaan kehakiman tidak hanya dengan merumuskan asas kemerdekaan di dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang terpenting asas kemerdekaan dilaksanakan dalam kenyataan.² Menurut Ismail Suny bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar bagi negara yang berdasarkan sistem demokrasi dan negara hukum.³ Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman. Seperti halnya Kejaksaan, Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-

¹MPR,UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (1) (Jakarta: Sekretaris jenderal MPR RI, 2018).

² Philipus.M.Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Suatu Analisis dalam Kenegaraan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 58.

³Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 209.

Undang Dasar 1945 akan tetapi pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁴Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.⁵

Selain wewenang kejaksanaan yang diberikan oleh Undang-Undang kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

⁴Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵ Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa di bidang penuntutan, yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 34 disebutkan bahwa:⁶

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5(lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5(lima) hari.
- (3) Dalam hal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pada pasal 99 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa:

“Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun”.

[illegible]

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sementara itu sebagai sebuah profesi, Kejaksaan memiliki kode etik yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari Independensi Jaksa sebagai Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*Judiciary Independence*).⁷

Di dalam UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga Negara tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Artinya, Negara memberikan hak kebebasan terhadap warga Negara tanpa adanya perlakuan yang tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, aliran politik,

[illegible]

Namun dalam faktanya, keberadaan pasal 99 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melampaui kewenangan jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di sisi lain Kejaksaan juga sudah membuat Undang-Undang kejaksaan sendiri yang didalamnya mengatur tugas dan wewenang seorang jaksa. Berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak. Serta untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Disisi lain dalam permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bermaksud untuk melindungi jaksa dari potensi kerugian konstitusional akibat adanya kriminaslisai yang berlebihan terhadap berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikarenakan sangat memberatkan pelaksanaan tugas seorang penegak hukum, belum juga dalam menjalankan tugas dengan penuh ketakutan dengan adanya kesalahan secara administrasi. Selain itu dilihat secara psikologis keberadaan pasal 99 sangat menekan psikologis penegak hukum.

[illegible]

Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 harus memenuhi lima syarat diantaranya:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional harus bersifat khusus dan aktual yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabunya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Hal ini menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai pertimbangan kedudukan hukum para pemohon bahwa:

- [illegible]

c. Sebagai sebuah profesi, Kejaksaan memiliki kode etik berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenang yang merupakan wujud dari Independensi Jaksa sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman;

d. Dengan masih berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara pasal yang muatannya serupa namun berbeda subjek hukum yaitu pasal 96, pasal 100, pasal 101 UU SPPA sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat secara hukum yaitu bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[illegible]

Dalam pandangan hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan fikih *siyāsah* . Fikih *siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁹

Ruang lingkup fikih *siyāsah* menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulṭhaniyyah* membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* terdapat lima bagian yaitu : *siyāsah dustūriyyah* (kebijakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan), *siyāsah malīyyah* (ekonomi moneter) *siyāsah qaḍā'iyah* (politik peradilan) *siyāsah harbīyyah* (Hukum Perang) , *siyāsah idārīyyah* (Administrasi negara).¹⁰

Apabila dilihat dari sisi lain pembagian dari ruang lingkup fikih *siyāsah* dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Pertama, *siyāsah dustūnīyyah* atau politik perundang-undangan yang meliputi kajiannya tentang penetapan hukum atau *tasyīr'yyah* oleh lembaga Legislatif, peradilan atau *qadāīyyah* oleh lembaga Yudikatif,

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qada*) memiliki suatu landasan dalam Islam. Dasar disyariatkan lembaga peradilan dalam Islam terdapat pada surah shaad ayat (26):

Artinya : Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi , maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

¹¹ Imam Amrusi Jelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara, maka *al-qāḍa* memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui hukum *al-*

¹³ M. Iqbal, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

1. Mendamaikan para pihak yang bersengketa
2. Menetapkan sanksi kepada yang melanggar hukum
3. Dapat melindungi jiwa, harta serta kehormatan kepada masyarakat
4. Menciptakan kemaslahatan umat
5. Terciptanya amar makruf nahi munkar.

Dalam hal tentang hukum sudah ada dan sudah ada yang lembaga yang mengatur, maka dalam hal ini hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut kedalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan demi tercapainya keadilan.¹⁴

Dari penjelasan di atas maka dapat dikategorikan masuk dalam fikih *siyā'sah* dalam konsep peradilan, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh individu atau masyarakat.

Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 terhadap Kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan judul Tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem

¹⁴ Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 17.

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan investigasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.¹⁵ Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- ¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), 8.

- Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

- [illegible]

pasal 1 angka 7 UU SPPA Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan ke proses diluar peradilan. Dipertegas pentingnya melakukan Diversi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi. Apabila dalam hal ini penegak hukum (penyidik, penuntut, hakim) yang tidak sengaja melakukan kewajibannya untuk mengupayakan Diversi pada perkara anak, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 96 penyidik, penuntut umum dan hakim akan dipidana paling lama 2 tahun. Ancaman pidana terhadap penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan upaya Diversi adalah bentuk keseriusan negara untuk melindungi hak-hak anak baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Namun di lain pihak yang berprofesi sebagai hakim merasa bahwa ancaman pidana terhadap penegak hukum merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Yang diamanatkan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Oleh karena itu jaminan jaminan atas kemnadirian peradilan adalah hak serta kewenangan konstitusional hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak dapat ditegakkan . dan implikasinya segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan akan

Suatu Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017?
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih *siyāṣah* terhadap kewenangan jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017?

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk pengembangan ilmu hukum. Dalam rangka membangun teori baru perihal reformasi

[illegible]

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat merevisi kebijakan negara yang mendukung perlindungan anak. Serta dapat memberikan pedoman kepada masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan.¹⁹

1. Fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk beluk urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan kebijaksanaan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan

[illegible]

3. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 adalah mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan pasal 99 UU SPPA No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Metode atau cara yang tepat untuk m

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. kegiatan metode ini berupa

²¹Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek diteliti dalam Perundang-Undangan.²³ Objek Penelitian hukum normatif meliputi

²³ M. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), 101.

norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undnagan, perbandingan hukum, doktrin serta Yurisprudensi.²⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dikaji selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang ada.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan dengan cara legislasi dan regulasi.²⁵ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis atau bentuk data diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Data primer

- a) Data mengenai kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Data mengenai konsep *wilāyah al-Mazālim*

²⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 199.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 137.

Bab kedua berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (fikih *siyāsah*) , konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *wilāyah al-mazālim*

Bab keempat berisikan analisis terhadap permasalahan yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua analisis, yakni pertama, analisis permasalahan mengenai kewenangan jaksa dalam mengadili perkara kejahatan anak Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Kedua,

TINJAUAN UMUM FIKIH *SIYĀSAH* DAN KEWENANGAN *WILĀYAH AL-MAZĀLIM*

Definisi yang telah diuraikan diatas mengandung persamaan. *Siyāṣah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat atau bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. *Siyāṣah syar'iyāh* atau fikih *siyāṣah* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), *siyāṣah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.⁴

⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 24.

Dari uraian tentang pengertian istilah fikih dan *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa pengertian fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam arti populer fikih *Siyāsah* adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.⁵

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih *siyāsah* atas beberapa bagian:

- ⁵ Ibid,26.

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan bahwa objek kajian fikih *siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya dengan mengingat persesuaian dengan jiwa syari'ah yang khusus dan tidak berlawanan suatu naṣṣ. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah mendasarkan objek pembasan bidang fikih *siyāsah* terletak pada surah Al-Nisa' ayat 58-59 yang menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

[illegible]

Dari ketiga pendapat diatas memberi gambaran bahwa objek pembahasan fikih *siyāsah*:

- Dari segi literatur objek fikih *siyāsah* bahasannya mencakup masalah *khilafah*, *imamah*, dan *imarah*. Didalamnya terdapat masalah mengenai:¹⁰

- ¹⁰ Ibid., 28.

Fikih *siyāṣah* merupakan bagian dari hukum Islam yang objek kajiannya mengenai kekuasaan. Fikih *siyāṣah* juga mengkaji hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Hukum Islam sendiri bertujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan kelompok. Terdapat kaidah fikih yang dapat dijadikan panutan dalam bidang kajian fikih *siyāṣah*. Hal ini yang bertujuan sebagai penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kaidah-kaidah fikih dalam bidang fikih *siyāṣah* adalah:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Kewajiban Imam adalah menegakkan hak atau kebenaran serta kemaslahatan ini bersandar dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan.

¹³ M Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136.

B. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Wilayah al-Mazūlim*

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Pengembangan dari budaya hukum masyarakat sebagai cara untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum. Dalam kerangka supermasi hukum mendapat pengakuan dan jaminan dari negara melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁵

¹⁴ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 201.

[illegible]

Sistem Undang-Undang Dasar 1945 banyak menekan fungsi dari kekuasaan eksekutif (presiden). Tanpa membuka ruang *check and balances* sehingga UUD NRI 1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh kembangnya otoritarianisme pada masa orde baru. Kejadian pada masa orde baru dalam permasalahan ketatanegaraan maka Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1999 dalam suatu naskah perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang disahkan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 telah mengakomodir suatu lembaga Negara yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁶

¹⁶ Ibid., 250.

Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan politik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu konsekuensi perubahan dari supermasi MPR menjadi supermasi konstitusi, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Dalam bunyi pasal 1 UUD NRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip dalam negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Dalam satu kesatuan hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan suatu hukum, yang berupa Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam segi politik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini penting agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi mayoritas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Serta dalam sistem ketatanegaraan tidak akan lagi menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menempatkan lembaga-lembaga Negara dengan posisi yang sesuai. Memungkinkan akan muncul sengketa antar lembaga Negara dan memerlukan forum untuk

[illegible]

menyelesaikannya. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang sesuai yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Dinyatakan secara tegas pada penjelasan umum Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setelah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2011. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk saling mengoreksi kinerja antar lembaga.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24C ayat 1 bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran partai politik. Dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam pasal 24C ayat 2

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.²⁰

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi untuk dilaksanakan dan dihormati baik

¹⁹ Ibid., 7.

²⁰ MPR, UUD NRI 1945, Pasal 24C (Jakarta: Sekretaris jenderal MPR RI, 2018).

3. Konsepsi *Wilāyah Al-Maẓalim*

[illegible]

Wilāyah al-Maẓālim telah dikenal di Arab sebelum Islam. Hal ini wujud komitmen Orang-Orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Riwayat dari Al-Zubair bin Bakar bahwa ada seorang laki-laki yaman berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain al-Ash bin Wali) membeli dagangannya. Laki-laki tersebut melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambil dia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran pedagang tersebut dan berteriak diatas sebingkah batu disamping Ka'bah seraya ia melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang dirasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon positif dari orang-orang Quraisy. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak-hak pedagang tersebut. Orang-orang Quraisy berkumpul dirumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat

[illegible]

pada masa Nabi, Abdullah bin Jadz'an pernah memerankan fungsi ini ketika terjadi kasus tentang irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan salah satu seorang dari golongan Anshar. Seseorang dari golongan tersebut berkata, "Alirkan air tersebut kesini," Zubair bin Awwam menolaknya. Nabi kemudian berkata: "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu,, dan setelah itu alirkan air tersebut ke tetanggamu". Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata: "Wahai Nabi apakah pantas engkau mengutamakan dia,bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi dan berkata," Wahai Zubair, Alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai kedua mata kakinya.²²

Riwayat diatas menegaskan bahwa Nabi adalah sebagai hakim Konstitusi sebagai penegak keadilan. Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti jihad. Sedangkan pada masa khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam mengakkan

[illegible]

4. Kewenangan *Wilayah Al-Mazalim*

[illegible]

- a) Ketidakadilan yang dilakukan gubernur terhadap rakyat serta penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-Maẓālīm* tidak diperbolehkan membiarkan kezaliman para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil.
- b) Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. *Wilāyah al-Maẓālīm* bertugas mengirim pegawai untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta serta bertugas untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta pajak kepada pemiliknya. Baik harta yang telah diserahkan ke bait al-mal atau untuk pribadi.
- c) Pegawai kantor pemerintahan (*Kuttab ad-Dawawin*) harus bersifat amanah karena umat Islam telah percaya kepada mereka dalam persoalan harta benda. Tugas *nadhīr al-maẓālīm* yaitu meneliti tingkah laku dan menghukum yang salah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- d) Kezaliman yang dilakukan pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, karena ada pengurangan atau keterlambatan pemberian. Ketika gaji tidak diberikan tugas *nadhīr al-maẓālīm* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan

[illegible]

yang zalim. Karena kecintaannya terhadap harta tersebut karena keinginannya untuk menzalimi. tugas *nadhir al-mazālim* mencegah perbuatan zakim apabila belum dilakukan.

f) Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ada dua macam, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf khusus tugas *nadhir al-maʿālim* mengawasi agar harta wakaf tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan. Wakaf khusus tugas *nadhir al-maʿālim* memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.

g) Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa untuk menjalankan proses peradilan karena status, kewibawaan dan kekuasaan terdakwa lebih tinggi darinya, maka *nadhīr al-maẓālīm* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari terdakwa.

h) Menjalankan fungsi *nadhir al-mazālim* ketika tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan umat.

i) Memelihara ibadah yang mengandung syariat Islam. Seperti perayaan hari raya, jihad dan haji dengan mengatur agenda serta

5. Struktur Keanggotaan *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam suatu bentuk lembaga harus terdapat struktur keanggotaan didalamnya. Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-maẓālim* harus terdapat lima orang mutlak dibutuhkan oleh *Nadhīr al-maẓālim* apabila tidak adanya lima orang tersebut tidak akan bisa berjalan lancar. Dibentuk dalam suatu bagan yaitu:



Wilāyah al-Mazālim menjadi lembaga khusus pada masa kekhalifahan bani umayyah, pada waktu pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus al-Mazālim. Abdul Malik bin Marwan didampingi Ibnu Idris al-Azdi apabila menemukan kesulitan dalam memutus hukum.

Sedangkan keberadaan di Indonesia *wilāyah al-maʿālim* kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi. Dikatakan dengan Mahkamah Konstitusi, karena *wilāyah al-maʿālim* bertujuan untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi khalifah, gu dan pejabat lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. A suatu peraturan yang berakibat rakyat merasa dirugikan konstitusionalnya oleh suatu Undang-Undang, dan sebagainya.

A. Sejarah Terbentuknya Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan badan negara yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada dasarnya Kejaksaan Republik Indonesia ialah meneruskan apa yang telah diatur dalam *Indische Staatsregeling* yang memuat kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan

[illegible]

Pada saat kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai menteri Jaksa Agung. Hal ini disebabkan Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dalam hal kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap berada di Presiden.

[illegible]

Perubahan selanjutnya terjadi setelah adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 menyebutkan bahwa Kejaksaan sebagai, “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan”. Dari adanya perubahan Konsideran ini terdapat perubahan penting terdapat adanya penegasan terhadap pandangan kedudukan Institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya Undang-Undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 terus berlaku hingga Negara Indonesia memasuki era Reformasi.

³ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4.

Hal ini menghasilkan kesepakatan yang telah disepakati bersama bahwa Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menurut sistem presidensial bahwa Kejaksaan Agung berada di bawah ranah Eksekutif maka menjadi kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Sejarah Ketatanegaraan Kejaksaan dari penjelasan diatas bahwa Kejaksaan dari awal terbentuknya hingga sekarang berada di bawah ranah eksekutif dan proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden.⁴

Kedudukan Kejaksaan Agung yang berada dalam ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan. Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum seharusnya berada dalam ranah yudikatif. Dalam paraktiknya melihat pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan pasal tersebut banyak pihak yang berpendapat bahwa
kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa

[illegible]

Kejaksaan merupakan lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Dilihat dari filosofi Hukum Pidana bahwa kejaksaan merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya benturan kepentingan antara pelanggar norma dan kepentingan masyarakat umum. Masyarakat umum berarti diwakili oleh pemerintah selaku pelanggar norma dan ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah sebagai penasihat negara apabila terdapat permasalahan hukum yang berada di ranah Hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara.⁵

pelanggar norma dan ditambah tugas-tugas Kejaksaan penuntutan adalah sebagai penasehat negara apabila terdapat permasalahan hukum yang berada di ranah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.⁵

Pada ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” haruslah masuk dalam ranah yudikatif.

., 7.

1. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, Jaksa dilarang merangkap menjadi:
 - a. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, atau badan usaha swasta;
 - b. Advokat,Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. Telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) Tahun;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁹

1. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - c. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; atau
 - d. Melakukan perbuatan tercela.
2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:¹⁰

1. Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil

⁹ Lihat pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰ Lihat pasal 14 Undang -Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai salah satu dari subsistem hukum yang menjadi satu kesatuan, saling mempengaruhi dan saling mengisi satu dengan yang lainnya untuk memperoleh tujuan dari hukum. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 setelah dilakukan perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu dari lembaga penegak hukum, perlindungan kepentingan umum penegakan Hak asasi manusia, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas serta wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

[illegible]

Jaksa sebagai penyelenggara serta pengendali penuntutan dalam batas yurisdiksi negara.¹¹

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹²

1. Di bidang pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam fungsinya bertugas sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan haruslah berpedoman pada Doktrin Kejaksaan yang termuat dalam Tri Krama Adhyaksa, yaitu:

¹¹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ” *Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan terbatas Platform upaya Optimalisasi Pengabdian Intitusi Kejaksaan*” (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999), 2.

¹² Lihat Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Dengan pedoman Tri Krama Adhyaksa maka diharapkan anggota Kejaksaan Khususnya Jaksa sebagai penegak hukum, untuk dapat lebih bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara di bidang penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan landasan Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa merupakan Pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber demi terwujudnya cita-cita serta tujuan negara dan bangsa. Hal ini pelaksanaan dan tujuan dari penegakan hukum sendiri berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.¹³

Putusan dalam peradilan adalah produk hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh hakim sebagai pihak yang berwenang dalam sidang yang dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan

[illegible]

Dengan berlakunya pasal 99 ini (*a quo*) mengakibatkan para pemohon dalam hal ini Jaksa merasa mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal 99 Undang-Undang sitem peradilan pidana anak. Bahwa kerugian konstitusional yang dapat merugikan jaksa diantaranya:

- ¹⁴ Ikhsan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 13.

[illegible]

Dari keterangan tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keterkaitan antara dalil permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012 yang menghapuskan pasal 96, pasal 100 dan pasal 101 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon saling berkorelasi dan tidak dapat dipisahkan dengan norma Undang-Undang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, menurut Mahkamah para pemohon beralasan Menurut Hukum. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

A. Analisis Kewenangan Jaksa dalam Mengadili Perkara Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017

1. Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hak dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penidaaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Hal ini yang menjadi ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan, pelaksana putusan pengadilan di bidang pidana, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus bertindak di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah wewenang di bidang perdata, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum di bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Salah satu yang menjadi kewenangan Jaksa adalah melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 pasal 34 menyatakan:

1. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari;
2. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari;
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Ketentuan pasal diatas menjadi kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan untuk mengadili perkara anak. Penjelasan pasal 34 ayat satu bahwa dalam hal penahanan dilakukan untuk proses penuntutan dilakukan penahanan paling lama lima hari. Dalam ayat dua apabila dalam ayat satu permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama lima hari. Dalam ayat tiga apabila dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat dua telah habis maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Hal ini yang menjadi Jaksa dalam melaksanakan tugas merasa tidak independen. Seharusnya dalam perkara anak untuk melakukan penahanan adalah wewenang Jaksa. Jaksa tidak akan menahan anak dalam proses penuntutan apabila tidak ada keperluan lain, dan tidak pula melakukan penahanan dengan batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Akan tetapi berlakunya pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang penahanan untuk proses penuntutan berkaitan dengan pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 34 ayat (3) yang menjadi keterkaitan dengan pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 99 menyatakan:

“ Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Ketentuan diatas, menyebabkan Jaksa dalam melakukan tugasnya dikenai aturan tentang berlakunya pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan matabat anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sebagaimana amanat yang terkandung dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun sebagai sebuah Instrumen hukum, Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ternyata tidak sepenuhnya sempurna, terdapat hal-hal yang mendapat perhatian terutama

Fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara serta semua bentuk hukumnya, peraturan ajaran dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam istilah mudahnya fikih *siyāsah* disebut dengan ilmu tata negara yang berkonsep negara Islam.

[illegible]

peradilan dalam kekuasaan yudikatif dan pelaksana pemerintah oleh lembaga eksekutif.

Dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah*, konsep kekuasaan sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Lembaga legislatif (*sultah tasyriyyah*) lembaga negara yang fungsinya untuk membuat Undang-Undang.
2. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidīyyah*) lembaga negara yang fungsinya untuk menjalankan Undang-Undang.
3. Lembaga yudikatif (*sultah qadā'īyyah*) lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga yaitu: *wilāyah al-qāḍa*, *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-maẓālim*. *Wilāyah al-qāḍa* adalah memutus hukum antara manusia dengan benar dan memutus hukum sesuai apa yang diturunkan oleh Allah Swt. *Wilāyah al-hisbah* adalah mengawasi Undang-Undang dan adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Wewenang *wilāyah al-hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dari Allah Swt. *Wilāyah al-Maẓālim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kezaliman penguasa terhadap hak-hak rakyat. Seperti contoh pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan rakyat serta membuat keputusan politik yang telah merugikan Hak Asasi Manusia.²

² M.Iqbal, *Fikih Siyasa*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَفَّقَ الشَّرْعَ

Bahwa dalam perkataan Imam Syafi'i dapat diartikan praktik berpolitik dalam bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa "Sistem politik dalam bernegara selalu berangkat dari tujuan-tujuan syariat". Tujuan syariat ini seperti, penegakan keadilan, terpenuhinya hak-hak warga negara, serta kesamaan hak-hak warga negara di depan hukum. Pembuatan suatu aturan dibentuk bertujuan tidak ada yang merasa dirugikan atas berlakunya peraturan tersebut.⁵

[illegible]

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirugikan akibat berlakunya suatu aturan yang mengikat. Ditinjau dari fikih *siyāsah* kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi kembali kepada Undang-Undang Kejaksaan. *Wilāyah al-mazālim* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sama kedudukannya dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu mempunyai wewenang untuk menangani segala bentuk kezaliman penguasa terhadap hak-hak rakyat yang dapat dirugikan dengan kebijakan politik yang telah dibuat.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atas kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak ditinjau dari fikih *siyāsah* masuk dalam *wilāyah al-mazālim*. *Wilāyah al-mazālim* merupakan pengadilan yang berwenang memutus perkara-perkara yang dibuat oleh pejabat negara atau penguasa dalam menjalankan tugas telah melanggar dan merugikan Hak Asasi Manusia. Kebijakan harus diambil tegas dalam mengambil keputusan yang mengandung banyak kemaslahatan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan permohonan uji materil Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 dikatakan lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jaksa terhindar dari rasa takut dengan ancaman dijatuhi sanksi pidana atau kriminalisasi dalam menangani perkara anak. Selain itu Jaksa dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Dalam tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017. Kekusaan kehakiman dalam islam dibagi menjadi tiga yaitu: *wilāyah al-qāḍa*, *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-maẓālim*. kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017 ditinjau dari fikih *siyāsah* termasuk wewenang *wilāyah al-maẓālim*. Kedudukan *wilāyah al-*

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya kewenangan Jaksa dalam mengadili perkara anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Jaksa dalam melakukan wewenangnya untuk tidak melakukan penahanan untuk proses penuntutan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur. Apabila hal tersebut tetap dilakukan maka termasuk merampas kemerdekaan seseorang. Putusan yang telah diputus Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menurunkan perlindungan terhadap anak akan tetapi lebih memberikan perlindungan hukum terhadap anak serta menjunjung tinggi harkat martabat anak.
2. Peneliti juga berharap kewenangan Jaksa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jaksa harus bertindak secara profesional dan tetap menjaga kode etik Jaksa serta harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan wewenang walaupun telah dihapuskan ancaman pidana yang menjeratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amrusi Jailani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: 2005.
- Azhary. Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum*,. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djalil, H.A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, .A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta:Kencana, 2003.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya Persepektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Estiko, Didit Hariadi. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: 2003.
- Hamzah, Andi. *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kadir, M.Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT Citra Aditya, 2004.
- M.Hadjon, Philipus. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang:Toha Putra, 2000

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulṭhaniyyah: Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Fadli Bahri), Jakarta: Darul Falah, 2006
- Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pulungan, J.Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- , *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Rahayu, “Hukum HAM”. *Jurnal Hukum*, No.1 Vol II, Februari, 2012.
- Rakhmat, Muhammad. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing, 2014
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rosyada, Ikhsan. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Salim, Abdul Mu’in. *Fikih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sam’un, *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Tutik, Triwulan Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wicaksana, Dio Ashar. “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”. *Jurnal Hukum*. No.1 Vol 1, Maret, 2013.
- Widjojanto, Bambang. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman: Upaya Membangun Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adilatuhu, Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tanggal Lahir : Mojokerto, 28 Juli 1997
 : Ds. Kweden-Kembar Kecamatan
 Kabupaten Mojokerto
 an/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum
 Tata Negara
 : C05215017
 : Tinjauan Fikih *Siyāsah* Ter
 Jaksa dalam Undang-Undang
 Pidana Anak No. 11 Tahu
 Terhadap Putusan Mahkamah
 68/PUU-XV/2017).

Tanggal Lahir : Mojokerto, 28 Juli 1997
 : Ds. Kweden-Kembar Kecamatan
 Kabupaten Mojokerto
 an/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum
 Tata Negara
 : C05215017
 : Tinjauan Fikih *Siyāsah* Ter
 Jaksa dalam Undang-Undang
 Pidana Anak No. 11 Tahu
 Terhadap Putusan Mahkamah
 68/PUU-XV/2017).